

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gerakan reformasi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 telah membawa berbagai dampak bagi negara Indonesia. Salah satu dampaknya adalah terhadap sistem pemerintahan yaitu dilakukannya pembagian kekuasaan dengan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti mengurangi peran Pemerintah Pusat dan memberikan otonomi kepada daerah. Sehingga, setiap Pemerintah Daerah berkewenangan untuk mengelola pemerintahannya sendiri.

Pemerintah telah menerbitkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan karena ketidakmerataan pembangunan di Indonesia. Ketidakmerataan pembangunan tersebut menyebabkan terjadinya konflik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Campur tangan Pemerintah Pusat juga menjadi alasan terhambatnya kreatifitas Pemerintah Daerah dalam mengelola potensi daerahnya masing-masing. Sehingga, untuk melakukan pemerataan pembangunan tersebut dilakukan suatu upaya berupa otonomi daerah.

Otonomi daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Hal ini menunjukkan, Pemerintah Pusat membuka peluang yang luas bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Hal ini diikuti pula dengan bergesernya pusat-pusat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dari pusat ke daerah. Sebagai konsekuensi logis, maka peningkatan kewenangan tersebut harus diimbangi pula dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas aparat Pemerintah Daerah.

Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dapat menunjang peningkatan pembangunan daerah. Pembangunan daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupan, seperti aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan sebagainya. Pemerintah Daerah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek dalam menjalankan pembangunan daerah tersebut. Perencanaan yang baik akan mengarah kepada cita-cita pembangunan yang diharapkan.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berdurasi waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD berisi tentang visi, misi dan arah pembangunan. RPJPD ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berdurasi 5 (lima) tahun. RPJMD disusun berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta memuat tujuan, sasaran, strategi



pembangunan dan arah kebijakan umum, prioritas pembangunan dan program Perangkat Daerah serta lintas Perangkat Daerah. Untuk implementasinya RPJMD ini selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

Salah satu bagian penting yang dinyatakan di dalam RPJMD untuk pendanaan pembangunan berasal dari pendapatan daerah. Menurut Halim (2007), pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan pada periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan daerah digolongkan menjadi tiga yaitu: (1) pendapatan asli daerah (PAD); (2) dana perimbangan; dan (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya, PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (pajak dan sumber daya alam), dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hibah, dana darurat, dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Pendapatan daerah merupakan salah satu komponen penting yang menentukan tercapainya RPJMD. Oleh karena itu, harus dilakukan analisis terhadap kinerja pendapatan daerah untuk mengetahui potensi dari pendapatan daerah tersebut. Menurut Mahmudi (2010), analisis kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari perbandingan realisasi pendapatan dengan targetnya. Apabila realisasi melampaui target maka kinerjanya dapat dikatakan baik. Selanjutnya, analisis kinerja dapat dilakukan menggunakan rasio keuangan. Hasil

analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja pendapatan daerah dan kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.

Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu daerah otonom, yakni daerah yang melaksanakan otonomi daerah, diwajibkan bagi pemerintahnya untuk menyusun RPJMD. Pendapatan daerah sebagai salah satu komponen penting sumber pendanaan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memerlukan analisis kinerja tertentu agar pendapatan daerah tersebut bersifat efektif untuk mendanai pembangunan daerahnya. Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis berupa analisis *varians* pendapatan dan analisis rasio keuangan yang terdiri dari: analisis rasio efektivitas pendapatan, rasio derajat sentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Semua metode analisis tersebut dapat digunakan untuk menilai kinerja pendapatan Pemerintah Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang analisis kinerja pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan judul ***“Analisis Kinerja Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pencapaian kinerja dari perbandingan realisasi dan target pendapatan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2015 diukur dari analisis *varians*?

2. Bagaimana pencapaian kinerja dari perbandingan realisasi dan target pendapatan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2015 diukur dari analisis rasio efektivitas?
3. Bagaimana kinerja pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2015 diukur dari tingkat desentralisasi fiskal?
4. Bagaimana kinerja pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2015 diukur dari tingkat ketergantungan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan tepat sasaran, maka peneliti harus mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pencapaian kinerja dari perbandingan realisasi dan target pendapatan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2015 diukur dari analisis *varians*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pencapaian kinerja dari perbandingan realisasi dan target pendapatan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2015 diukur dari analisis rasio efektivitas.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2015 diukur dari tingkat desentralisasi fiskal.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2015 diukur dari tingkat ketergantungan keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Semua informasi yang dihasilkan melalui penelitian dan studi literatur ini

diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Bagi Penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis mendapatkan pengetahuan yang diperoleh selama masa pendidikan dan juga penulis dapat memperoleh wawasan mengenai pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Bagi Ilmu Pengetahuan, diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu keuangan khususnya mengenai analisis kinerja pendapatan daerah.
3. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang berguna sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang mengenai kinerja pendapatan daerah.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan terbatas karena hanya menganalisis kinerja pendapatan daerah untuk periode RPJMD 2011-2015 dengan analisis tertentu.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bagian atau bab yang disusun dengan urutan dan penjelasan sebagai berikut :

BAB I : Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan/ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menjelaskan landasan teori yang berisikan dasar teoritis, penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis, dan kerangka pemikiran.

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB V : Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

